



bank nbp
pt bpr nbp 25

Tembung, 05 Mei 2025

No : ~~A.668~~ /BPR NBP 25/V/2025

Kepada Yth:

Bapak Ketua Umum DPP Perbarindo & Majalah Media BPR
Rumah Perbarindo
Komplek Patra II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani-By. Pass
Cempaka Putih-Jakarta Pusat, 10510

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR NBP 25 Tahun 2024


Dengan hormat,

Selubungan dengan POJK 9 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS Pasal 102 yang mengatur bahwa BPR wajib menyampaikan Laporan Tata Kelola kepada Asosiasi BPR dan Majalah Media BPR, maka bersama dengan ini kami menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR NBP 25 Tahun 2024 (terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. BPR NBP 25


Arisma Romalan Barus, SE
Direktur Utama


Pardingotan Sinabutar
Direktur

Cc: File

Kantor Pusat BPR NBP 25
Jl. Raya Tembung No. 21-4, Komplek Patra Pasar Gambir
Des. Perhut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
Telp. (061) 7192 948
E-mail : bprnbp25@yahoo.com
Website : www.pdbprnbp25.co.id

Kantor Kas
Jl. Sudirman Dusun III Desa Cinta Rakyat
Des. Perhut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
Telp. (061) 8992 208



BANK SAHABAT ANAK NEGERI



bank nbp
pt bpr nbp 25

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25
Jl. Raya Tembung No. 15 K Komp. Ruko Psr. Gambir
Kec. Percut Sei Tuan - Deli Serdang
Website: www.ptbprnbp25.co.id Telepon: 0617380948

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Tembung, 31 Januari 2025

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25

Disetujui Oleh,

Jimm Simanungkalit, SE
Komisaris Utama



bank nbp
pt bpr nbp 25

Arisma Romalan Barus, SE
Direktur Utama

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Dua Puluh Lima

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933167-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600018-02052025161614

Periode Data

2024

User ID Pelugas Pelaporan

nofrianita@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-05-02 16:16:14



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 25
TAHUN 2024**



**bank nbp
pt bpr nbp 25**

**Jl. Raya Tembung No. 15 K Komp. Ruko Psr. Gambir
Kec. Percut Sei Tuan - Deli Serdang
TELEPON: 0617380948**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	PT. BPR NBP 25
Alamat	Jl. Raya Tembung No. 15 K Komp. Ruko Psr. Gambir Kec. Percut Sei Tuan - Deli Serdang
Nomor Telepon	(061) 7380948

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di PT BPR NBP 25 pada 2024 membawa perkembangan positif dengan peningkatan kinerja meskipun menghadapi tantangan ekonomi.

BPR NBP 25 berkomitmen menerapkan Tata Kelola sesuai standar OJK guna memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing di industri perbankan, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Penerapan GCG didukung oleh integritas tinggi melalui proses internal yang melibatkan seluruh organ bank, terutama Direksi dan Dewan Komisaris sebagai pemangku peran utama.

Dengan pengalaman lebih dari 28 tahun, BPR NBP 25 senantiasa menerapkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kesetaraan dalam operasionalnya. Komitmen ini selaras dengan visi Bank sebagai penyedia layanan perbankan terpercaya yang memenuhi kebutuhan masyarakat melalui SDM kompeten.

Penerapan GCG berlandaskan tiga aspek utama, yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses, serta Hasil Tata Kelola, yang bertujuan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

Sepanjang 2024 dan ke depan, BPR NBP 25 terus mengimplementasikan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Mandiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	---------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama	Arisma Romalan Barus, SE
---------	--------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen.



dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian, Anggaran Dasar, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku

3. Merealisasikan pencapaian target/ sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan sehat pada seluruh jenjang organisasi BPR
4. Menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif ;
5. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (apabila diperlukan) sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR.
6. Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk action plan dengan tenggang waktu (deadline) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama dilaporkan kepada stakeholders terkait.
7. Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas Pengawasan Aktif Pengurus sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR;
8. Menyampaikan kebijakan BPR yang bersifat strategis dalam bidang Kepegawalan kepada seluruh Pegawai BPR;
9. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas dalam pengelolaan BPR kepada Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Nama

Pardingotan Sinabutar

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Memastikan bahwa seluruh Unit Kerja di BPR memiliki pedoman kerja yang terkini sesuai dengan job description dan struktur organisasi BPR;
2. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui Surat Edaran Direksi BPR, atau secara langsung dengan melakukan tatap muka;
3. Melakukan pemantauan secara konsisten terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan proses pemberian kredit untuk nasabah besar yang akan berdampak signifikan terhadap usaha BPR;
4. Melakukan review (kaji ulang) terhadap rancangan kebijakan internal BPR yang akan diterbitkan untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan;
6. Memantau kewajiban penyampaian laporan BPR sesuai ketentuan, misalnya kewajiban Laporan Keuangan Tahunan BPR, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR, dan lain-lain.
7. Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk action plan dengan tenggang waktu (deadline) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama dilaporkan kepada stakeholders terkait.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen



Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.

- b. Memantau ketersediaan dana (cash ratio dan likuiditas) dan memantau pengelolaan atau pun penempatan ABA.
- c. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- d. Meningkatkan penyaluran kredit dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan evaluasi atas produk sesuai kebutuhan pasar.
- e. Menerapkan Peraturan Perusahaan, dan tidak ditemukan pegawai BPR yang melakukan pelanggaran yang bersifat materil bagi BPR NBP 25.
- f. Menindaklanjuti temuan OJK sesuai dengan tenggang waktu.
- g. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Direksi melakukan rapat yang dilakukan bersama bagian marketing dan para PE untuk mengevaluasi kinerja BPR, melaksanakan penerapan tata kelola dan MR serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Dewan Komisaris

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Nama:

Jimmi Simanungkalit, SE

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
- (6) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- (7) Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.



Nama Fitriana Siregar,SE

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- (1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
- (6) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya
- (7) Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRkepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

Rekomendasi Kepada Direksi:

1. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
2. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar ditindaklanjuti dan tidak terjadi kembali berulang
3. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan.
4. Mitigasi Risiko harus diambil untuk menghindari dan mengatasi risiko yang timbul, maka untuk itu perlu diambil langkah- langkah perencanaan mitigasi risiko. Contohnya mengulas kembali pelatihan-pelatihan competency untuk masing-masing bagian

Dewan Komisaris tetap melakukan pengawasan penerapan tata kelola dan manajemen risiko melalui rapat - rapat intern setiap melakukan kunjungan ke BPR

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil



5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Nihil

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Arisma Romalan Barus, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,18
2.	Nama	Pardingotan Sinabutar
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Jimmi Simanungkalit, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Fitriana Siregar, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Direktur Utama memiliki saham di PT. BPR NBP 25 sebesar 0,18%, sedangkan Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT. BPR NBP 25.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Fitriana Siregar, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 9
	Persentase Kepemilikan (%)	1,12
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	1,12



Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 1
	Persentase Kepemilikan (%)	65,60
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	65,60
2	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 2
	Persentase Kepemilikan (%)	50,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	50,00
3	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 3
	Persentase Kepemilikan (%)	90,57
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	90,57
4	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 4
	Persentase Kepemilikan (%)	71,32
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	71,32
5	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 6
	Persentase Kepemilikan (%)	67,99
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	67,99
6	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 7
	Persentase Kepemilikan (%)	97,00



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	97,00
7	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 8
	Persentase Kepemilikan (%)	74,97
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,97
8	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 9
	Persentase Kepemilikan (%)	88,53
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	88,53
9	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 10
	Persentase Kepemilikan (%)	93,81
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	93,81
10	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 11
	Persentase Kepemilikan (%)	81,08
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	81,08
11	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 12
	Persentase Kepemilikan (%)	56,94
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	56,94
12	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 14
	Persentase Kepemilikan (%)	63,28



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	63,28
13.	Nama	PT. Nusanantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 15
	Persentase Kepemilikan (%)	77,52
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	77,52
14.	Nama	PT. Nusanantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 16
	Persentase Kepemilikan (%)	74,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,00
15.	Nama	PT. Nusanantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 17
	Persentase Kepemilikan (%)	75,75
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	75,75
16.	Nama	PT. Nusanantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 18
	Persentase Kepemilikan (%)	89,85
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	89,85
17.	Nama	PT. Nusanantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 19
	Persentase Kepemilikan (%)	72,61
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	72,61
18.	Nama	PT. Nusanantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 20
	Persentase Kepemilikan (%)	76,75



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	76,75
19	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 22
	Persentase Kepemilikan (%)	82,84
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	82,84
20	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 24
	Persentase Kepemilikan (%)	72,97
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	72,97
21	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 27
	Persentase Kepemilikan (%)	76,21
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	76,21
22	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 28
	Persentase Kepemilikan (%)	76,38
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	76,38
23	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 29
	Persentase Kepemilikan (%)	74,73
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	74,73
24	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 31
	Persentase Kepemilikan (%)	72,68



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	72,68
25.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 32
	Persentase Kepemilikan (%)	58,31
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	58,31
26.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 33
	Persentase Kepemilikan (%)	78,58
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	78,58
27.	Nama	PT. Nusantara Bona Pasogit
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 34
	Persentase Kepemilikan (%)	92,15
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	92,15
28.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 1
	Persentase Kepemilikan (%)	0,38
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,38
29.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 3
	Persentase Kepemilikan (%)	3,46
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,46
30.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 8
	Persentase Kepemilikan (%)	5,49



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	5,49
21.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 15
	Persentase Kepemilikan (%)	12,33
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	12,33
22.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 17
	Persentase Kepemilikan (%)	3,75
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,75
23.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 18
	Persentase Kepemilikan (%)	4,08
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	4,08
24.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 22
	Persentase Kepemilikan (%)	0,80
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,80
25.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 24
	Persentase Kepemilikan (%)	5,01
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	5,01
26.	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 27
	Persentase Kepemilikan (%)	0,90



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,90
37	Nama	Ricardo Simatupang
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 33
	Persentase Kepemilikan (%)	5,01
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	5,01
38	Nama	Josephine Sumillam Sitorus
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 15
	Persentase Kepemilikan (%)	3,96
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,96
39	Nama	Josephine Sumillam Sitorus
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 16
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	10,00
40	Nama	Josephine Sumillam Sitorus
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 27
	Persentase Kepemilikan (%)	1,27
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	1,27
41	Nama	Josephine Sumillam Sitorus
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 28
	Persentase Kepemilikan (%)	2,15
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	2,15
42	Nama	Josephine Sumillam Sitorus
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR NBP 29
	Persentase Kepemilikan (%)	4,38



Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	4,38
---	------

Komisaris dan Pemegang Saham memiliki saham di kelompok usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1	Nama	Fitriana Siregar, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR NBP 9
	Persentase Kepemilikan (%)	1,12

Komisaris atas nama Fitriana Siregar, SE memiliki saham di PT. BPR NBP 9

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1	Nama	Arisma Romalan Barua, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

2	Nama	Pardingotan Sinabutar
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1	Nama	Jimmi Simanungkalit, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2	Nama	Fitriana Siregar, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1	Nama	Arisma Romalan Barus, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2	Nama	Pardingotan Sinabutar
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada



Direksi Lain di BPR	
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1	Nama	Jimmi Simanungkalit, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

2	Nama	Fitriana Siregar,SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga anggota Direksi, Dewan komisaris dan Pemegang saham pada BPR

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

11.1 Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp588.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji	Rp355.200.000



Komisaris (Rp)

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp41.400.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp28.512.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
--	---------



Jumlah Nominal Keseluruhan
Remunerasi lainnya Direksi (Rp) Rp178.753.170

Jumlah Komisaris Penerima
Remunerasi lainnya 2 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan
Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) Rp92.052.000

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan
(Orang) 2 orang

Jumlah Nominal Perumahan Direksi
(Rp) Rp28.000.000

Jumlah Komisaris Penerima
Perumahan (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Perumahan
Komisaris (Rp) Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima
Transportasi (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Transportasi Direksi
(Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima
Transportasi (Orang) 2 orang

Jumlah Nominal Transportasi
Komisaris (Rp) Rp67.800.000

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi
Kesehatan (Orang) 2 orang

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan
Direksi (Rp) Rp14.126.384

Jumlah Komisaris Penerima Asuransi
Kesehatan (Orang) 0 orang



Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan
Komisaris (Rp) Rp0

2.4 Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas
Lain-Lainnya (Orang) 2 orang

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-
Lainnya Direksi (Rp) Rp77.678.900

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas
Lain-Lainnya (Orang) 0 orang

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-
Lainnya Komisaris (Rp) Rp0

Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 5,23 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,08 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan
Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,31 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang
tertinggi

Rasio (a/b) 1,27 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,77 : 1

Perbandingan tersebut berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang diterima dalam 1 (satu) tahun



13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1	Tanggal Rapat	08 Januari 2024
	Jumlah Peserta	8 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
		1. Evaluasi kinerja tahun 2023 2. Evaluasi kantor kas "Cinta Rakyat" 3. Rencana pembukaan kantor kas 4. Update SK Dir yang lama 5. Rencana Kick OFF seluruh SDM
2	Tanggal Rapat	17 Februari 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
		1. Evaluasi kinerja SDM 2. kualitas kredit 3. penyelesaian NPL
3	Tanggal Rapat	16 Mei 2024
	Jumlah Peserta	8 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
		1. Evaluasi rapat sebelumnya 2. Evaluasi kinerja April 2024 3. kualitas kredit 4. pelaksanaan APU PPT 5. Evaluasi kinerja SDM
4	Tanggal Rapat	23 Februari 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
		1. Persiapan RUPS-LB tanggal 5 Maret 2024 2. Kinerja Januari 2024 3. Rencana tindak lanjut SAK-EP
5	Tanggal Rapat	17 Mei 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
		1. Evaluasi kinerja keuangan bulan April 2024 2. On The Spot ke debitur yang bermasalah



6.	Tanggal Rapat	16 Juli 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	1. Rapat Pengurus	
	2. Evaluasi kinerja	
	3. kualitas kredit	
	4. tindak lanjut rapat sebelumnya	
7.	Tanggal Rapat	06 November 2024
	Jumlah Peserta	8 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	1. Evaluasi rapat pengurus	
	2. rencana penyusunan RBB 2025	
	3. Persiapan Rups-LB	

Sepanjang Tahun 2024 pelaksanaan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali baik dilakukan secara daring dan luring.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat Tahun 2024 (Tahun) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jimmi Simanungkalit
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	2 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Fitriana Siregar
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	5 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	2 kali hadir

Sepanjang Tahun 2024 Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan kehadiran fisik Dewan Komisaris 5 (lima) kali dan telekonferensi 2 (dua) kali.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus



Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan 0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan 0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan 0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan 0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan 0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan 0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan 0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya 0 kasus



Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4 Analisis Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Penyimpangan Internal (Internal Fraud) di PT BPR NBP 25 pada periode Tahun Laporan tidak ada atau NIHIL.



16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 0 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian 0 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian 0 kasus

NIHIL

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan pada periode Tahun Laporan di PT BPR NBP 25 atau NIHIL

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1	Tanggal Pelaksanaan	12 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	HKBP Bandar Klippa
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan ucapan syukur ke gereja HKBP Bandar Klippa atas kesempatan melakukan sosialisasi literasi & Inklusi keuangan pada hari minggu 14 Juli 2024
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
2	Tanggal Pelaksanaan	28 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial



Penerima Dana	Panitia posko kebakaran
Penjelasan Kegiatan	Biaya sumbangan untuk korban kebakaran sekitar wilayah kantor pusat
Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
Tanggal Pelaksanaan	11 November 2024
Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
Penerima Dana	Panitia Natal
Penjelasan Kegiatan	Biaya sumbangan dana natal oikumene tahun 2024 provinsi Sumatera Utara
Jumlah (Rp)	Rp500.000

Selama tahun 2024 PT. BPR NBP 25 ikut serta dalam pemberian dana untuk kegiatan sosial

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembung, 21 April 2025

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25



Arisma Romalan Barus, SE
Direktur Utama


Jimmi Simanungkalit, SE
Komisaris Utama